



Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

RENCANA STRATEGIS **TAHUN 2020-2024**

**“Mewujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang Berintegritas dan Akuntabel”**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2, 3, 4
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522310, FAKSIMILE (021) 3522310
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK itjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 251/KEP-ITJEN/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern dalam mengawal pembangunan bidang kelautan dan perikanan, perlu adanya suatu perencanaan strategis yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun program dan kegiatan pengawasan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

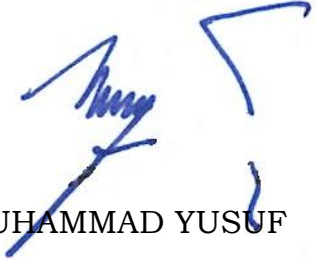
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Jenderal ini;

KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pengawasan maupun dukungan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal;

- KETIGA Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Itjen KKP dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan pengawasan terjadi perubahan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini, maka akan dilakukan revisi dengan didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2020
INSPEKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD YUSUF

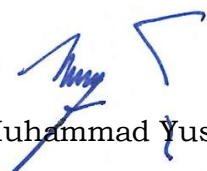
KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Jenderal KKP periode 2015 – 2019, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis dan Rencana Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Mengingat hal tersebut, maka semua pimpinan, auditor dan staf Inspektorat Jenderal harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pengawasan pembangunan Kelautan dan Perikanan dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024 yaitu “Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”, akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Terwujudnya kinerja KKP yang efektif dan efisien; Terciptanya suatu sistem dan tata kelola KKP yang baik; dan Terwujudnya budaya integritas di lingkungan KKP.

Jakarta, 1 Juli 2020
Inspektur Jenderal



Muhammad Yusuf

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	24
A. Visi	24
B. Misi	24
C. Tujuan	25
D. Sasaran Strategis	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN NASIONAL, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN.....	30
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	30
B. Kebijakan Pengawasan	32
C. Strategi Pengawasan	33
D. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	36
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
A. Indikator Kinerja	39
B. Kerangka Pendanaan	41
BAB V PENUTUP.....	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Internal pada KKP Tahun 2015-2019	5
Tabel 2.	Unit Kerja KKP yang Mendapat Predikat WBK	12
Tabel 3.	Target dan Capaian (Kumulatif) Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2015-2019	13
Tabel 4.	Capaian Level Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2015-2019	14
Tabel 5.	Level Kapabilitas APIP di Indonesia berdasarkan Metode IACM s.d Tahun 2018	15
Tabel 6.	Hasil Pencapaian Nilai Evaluasi Level Maturitas SPIP KKP	16
Tabel 7.	Realisasi Kegiatan Pengawasan Prioritas Tahun 2015-2019	19
Tabel 8.	Uraian Tujuan dan Indikatornya	25
Tabel 9.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program	40

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Perkembangan Opini Laporan Keuangan KKP 2009-2018	5
2. Perkembangan Nilai AKIP KKP Tahun 2014-2018	8
3. Perkembangan Nilai RB KKP Tahun 2014-2018	9
4. <i>Quality Assurance dan Advisory Services</i>	26
5. Kerangka Logis Itjen KKP	27
6. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP	38

Lampiran
Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor 251/KEP-ITJEN/2020
tentang
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2015-2019

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019, Inspektorat Jenderal KKP turut serta membantu dan mendukung seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan 3 pilar pembangunan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan antar lain:

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan, pada periode 2015-2019 tersebut, Inspektorat Jenderal KKP memfokuskan peran dan layanan sebagai *quality assurance* dan *advisory services*. Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori dimensi waktu yaitu: (a) optimalisasi pemanfaatan aset tahun-tahun sebelumnya, (b) pengawalan kegiatan strategis/prioritas pada tahun berjalan, dan (c)

perencanaan dan penganggaran berbasis manajemen risiko untuk kegiatan tahun yang akan datang.

Kondisi yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsinya adalah “Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja KKP”. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Cita-cita Itjen KKP yang ingin menjadi katalisator pembaharuan kinerja, *consulting partner* dan memberikan peringatan dini atas adanya potensi risiko merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja Itjen lingkup KKP.

Sebagai langkah konkret terhadap cita-cita di atas, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Itjen KKP diarahkan untuk memberikan pengawasan terbaik untuk peningkatan kinerja KKP. Dengan demikian, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi yaitu “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, selain terdapat kebijakan pokok yang mencerminkan program utama KKP, juga terdapat kebijakan lintas bidang yang secara langsung harus sinergis dengan kebijakan pokok. Salah satu dari empat kebijakan lintas bidang yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang

baik, yang terdiri atas: (i) membangun budaya kerja yang profesional; dan (ii) meningkatkan kualitas pengawasan internal.

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Itjen sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP adalah dengan meningkatkan kualitas pengawasan internal, melalui:

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis; dan
- c. Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Arah kebijakan pengawasan tersebut, secara operasional dilaksanakan dalam “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP”. Selanjutnya program tersebut diterjemahkan dalam tiga strategi, yaitu:

- a. Peningkatan Integritas;
- b. Peningkatan Akuntabilitas; dan
- c. Peningkatan Kapabilitas Organisasi.

Dua strategi yang disebutkan di awal (butir a dan b), diarahkan kepada lingkungan eksternal Itjen, yaitu seluruh unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun strategi terakhir (butir c), akan difokuskan pada internal Itjen, yaitu peningkatan kapabilitas Itjen, baik dari sisi organisasi maupun sumber daya manusia.

Beberapa prestasi dan capaian kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal KKP selama Tahun 2015-2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. IKU Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP.

Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal (BPK RI) dari total realisasi anggaran KKP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP hasil pemeriksaan BPK RI atas kegiatan KKP pada tahun tertentu dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun yang sama.

Opini dari BPK-RI merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan atas penyajian Laporan Keuangan (LK) suatu Kementerian. Pemberian opini tersebut didasarkan pada 4 empat kriteria yaitu: (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Efektifitas Sistem pengendalian Intern, (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) kecukupan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun kategorinya dari terendah yaitu Tidak Wajar (TW), berikutnya Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/*disclaimer*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, penting bagi setiap Kementerian upaya memperoleh dan mempertahankan level tertinggi (WTP) tersebut. Salah satu pertimbangannya yaitu guna mencegah timbulnya persepsi publik seolah-olah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara. Berikut akan dibahas capaian kinerja atas LK lingkup KKP untuk periode 2014-2019, *lesson learned*, dan rencana aksi untuk mempertahankannya dari sisi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Itjen untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain kegiatan Probit Audit, Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan, Reviu Penganggaran, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, Audit Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan, Evaluasi SPI, Pengawasan Pengelolaan Aset, Evaluasi PNBPN, Evaluasi Penyerapan

Anggaran, Pengawasan Program Strategis KP, Pengawasan Lainnya, Asistensi Penyusunan LK, Reviu LK, Audit dengan Tujuan Tertentu, Inspeksi Pimpinan dan Koordinasi dengan BPK.

Perkembangan capaian nilai temuan materialitas pengawas eksternal pada KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal Pada KKP Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Temuan Materialitas Pengawas Eksternal				
	2015	2016	2017	2018	2019
Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran	0,151%	0,441%	3,64%	0,80%	0,04%



Gambar 1. Perkembangan Opini Laporan Keuangan KKP 2009-2018

Catatan: Opini WTP DPP (*modified unqualified opinion*) yaitu ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.

Gambar diatas menunjukkan perkembangan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan KKP sejak tahun 2009 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami perbaikan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada Tahun 2010 sampai dengan 2014. Selanjutnya pada 2015, opini terhadap LK KKP mengalami peningkatan

dengan capaian opini WTP murni. Namun, opini terhadap LK KKP Tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Opini LK KKP kembali mencapai WTP pada TA 2018. Predikat WTP atas LK KKP tersebut, menunjukkan bahwa LK KKP telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, auditor BPK meyakini bahwa KKP dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sebaliknya, capaian predikat *disclaimer* pada atas LK tahun 2016 dan 2017 merupakan penurunan jika dibandingkan dengan capaian opini atas LK periode 2010 s.d. 2013 yang paling rendah mencapai predikat WTP-DPP seperti disajikan pada Tabel 1. Opini *disclaimer* diberikan ketika auditor/pemeriksa tidak memperoleh bukti cukup dan tepat untuk mendasari opini dan/atau adanya pembatasan dari entitas pelaporan terhadap auditor/pemeriksa dalam memperoleh bukti.

b. IKU Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi bantuan pemerintah dari KKP kepada masyarakat/pemda/BUMN/D berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. IKU ini diharapkan untuk menjawab pengendalian atas realisasi bantuan pemerintah dari KKP agar sesuai dengan target yang ditetapkan. IKU ini dilaksanakan pengukuran sejak Tahun 2017 untuk menggambarkan pencapaian kesesuaian bantuan KKP.

Evaluasi dilaksanakan terhadap bantuan pemerintah yang telah diterima oleh penerima bantuan dengan komponen penilaian meliputi Kesesuaian Kebutuhan (bobot 20%) Kesesuaian Sarana dan Prasarana (bobot 25%), Kesesuaian Sasaran (bobot 50%) dan Kesesuaian Pelaporan dan Pemanfaatan (bobot 5%). Strategi yang digunakan pada evaluasi ini yaitu evaluasi pada tingkat Eselon I dan dilakukan pengujian pada penerima bantuan di kab/kota. Metodologi yang digunakan adalah teknik "*criteria referrenced survey*" yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assesment*) dengan kriteria evaluasi masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Capaian pada tahun 2017 sebesar 90,18%, sedangkan tahun 2018 sebesar 91,15% atau mengalami peningkatan sebesar 0,97%, dan pada tahun 2019 mencapai nilai 91,91% atau naik sebesar 0,76%. Namun terdapat beberapa catatan diantaranya: 1). Belum tersedianya sarana prasarana pendukung; 2). Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan; 3). Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak; serta 4). Pelaporan yang belum tertib. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung proses pengukuran IKU ini yaitu berupa evaluasi Bantuan Pemerintah masih dalam proses pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa tahap pengujian dilapangan.

c. IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP

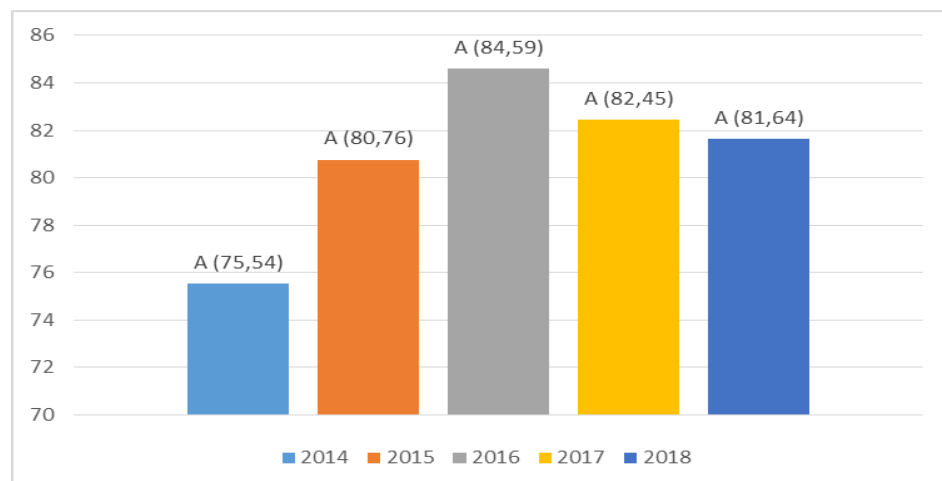
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP pada periode evaluasi. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

Capaian untuk nilai Akuntabilitas Kinerja KKP pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tren nilai capaian mengalami

kenaikan yaitu secara berturut-turut dengan nilai A (75,54) untuk tahun 2014, nilai A (80,76) untuk tahun 2015, dan nilai A (84,59) untuk tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tren capaian mengalami penurunan, meskipun masih dalam kategori nilai A. Adapun tren capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 secara berturut-turut yaitu dengan nilai A (82,45) untuk tahun 2017, dan nilai A (81,64) untuk tahun 2018. Penurunan tren capaian tersebut disebabkan adanya kelemahan pada proses pemantauan dan evaluasi proses pencapaian target, serta masih rendahnya implementasi *reward and punishment*.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Itjen untuk mendukung pencapaian hasil akuntabilitas kinerja KKP yaitu asistensi implementasi SAKIP, evaluasi SAKIP, dan penilaian SAKIP pada masing-masing unit kerja Eselon I di lingkup KKP.

Perkembangan nilai evaluasi AKIP KKP dapat dilihat pada grafik berikut:



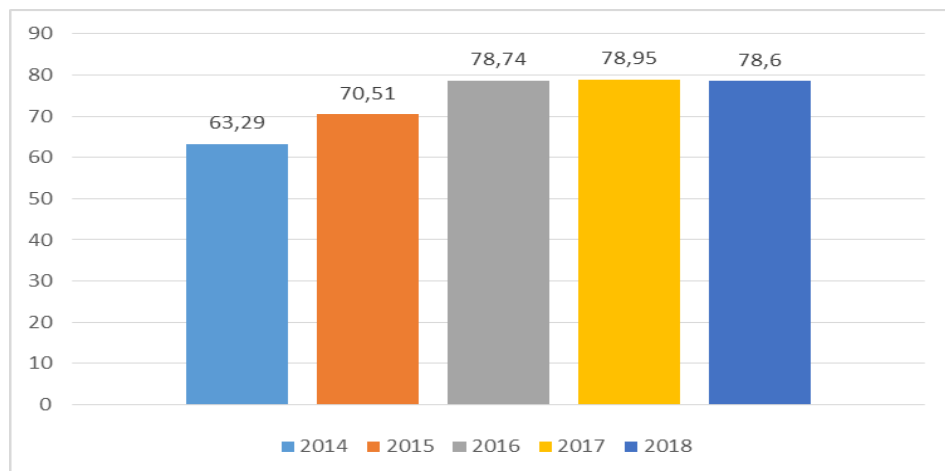
Gambar 2. Perkembangan Nilai AKIP KKP 2014-2018

- d. IKU Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP
- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (RB) KKP adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih professional, efektif, dan akuntabel

di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program pembangunan bidang KP. Upaya yang dilakukan Itjen untuk mencapai target IKU ini antara lain:

- 1) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP dan Unit Kerja pada 9 unit Eselon I.
- 2) Pelaksanaan Survey Internal Kapasitas organisasi dan Intergritas Jabatan pada 9 unit Eselon I.
- 3) Pemantauan Tindak lanjut pelaksanaan PMPRB KKP dan Unit Kerja Eselon I.
- 4) Panel Assesor hasil evaluasi Penilaian PMPRB KKP dan unit kerja Eselon 1.
- 5) Konsensus hasil Evaluasi Penilaian PMPRB KKP yang akan di Submit ke Kemen PAN –RB.
- 6) Pendampingan Tim Verikator Kementerian PAN dan RB.

Perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi KKP dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. Perkembangan Nilai RB KKP Tahun 2014-2018

e. IKU Nilai Evaluasi Pelayanan Publik

Inspektorat Jenderal telah melakukan asistensi, penilaian dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi Kempanan RB Bidang Pelayanan Publik yang diselenggarakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) lingkup KKP menuju budaya pelayanan prima dan mengutamakan kepuasan pengguna jasa. Dalam hal ini UPP secara berkelanjutan melakukan perbaikan-perbaikan

dan melaksanakan rekomendasi dari Itjen baik terhadap Standar Pelayanan terkait Penyampaian Pelayanan (*service deliver*) maupun proses pengelolaan pelayanan internal (*manufacturing*) di masing-masing UPP di Daerah dan di PTSP Pusat dengan mengadakan forum Konsultasi Publik dan melalui *questioner* Survey Kepuasan Masyarakat. Upaya sinergis tersebut menghasilkan peningkatan kinerja dalam pelayanan publik KKP dan terjadi peningkatan nilai Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan penilaian yang dilaksanakan pihak eksternal:

- 1) Hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meningkat dari Nilai Kepatuhan 60,58 (Zona Kepatuhan Sedang) pada Tahun 2015 menjadi 91,13 (Zona Kepatuhan Tinggi) pada Tahun 2017, ORI melakukan penilaian periode 2 (dua) tahun sekali.
- 2) Hasil penilaian Kemenpan RB Bidang Pelayanan Publik selama periode 4 (empat) tahun adalah:
 - a) Komponen Pengungkit terhadap Peningkatan Pelayanan Publik dengan target 6 pada Tahun 2015 mencapai 4,25, Tahun 2016 mencapai 4,41, Tahun 2017 mencapai 4,41, Tahun 2018 mencapai 4,86.
 - b) Hasil penilaian Komponen Hasil terhadap Kualitas dengan target 10 pada Tahun 2015 mencapai 7,32, Tahun 2016 mencapai 8,73, Tahun 2017 mencapai 8,26, Tahun 2018 mencapai 8,58.

Penilaian terhadap pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Layanan pada lingkup Eselon I yang dilakukan Inspektorat Jenderal memenuhi target IKU yang ditetapkan masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Eselon I Lingkup KKP setiap tahun dan mampu membuat perbaikan layanan yang berkontribusi pada nilai Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik.

f. IKU Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif)

Jumlah Unit Kerja Berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah jumlah unit kerja yang telah memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 poin. Capaian jumlah satker yang telah memenuhi syarat tersebut berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau penilaian internal berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini diantaranya adalah: a) Menyusun dan sosialisasi pedoman evaluasi pembangunan zona integritas; b) Evaluasi pembangunan zona integritas; (c) Pemantauan pembangunan zona integritas; dan (d). Pra penilaian dan penilaian oleh Tim Penilai Internal.

Capaian IKU ini secara kumulatif selama tahun 2014-2019 baik melalui penilaian eksternal (KemenPAN dan RB) maupun penilaian internal adalah sebanyak 35 unit kerja lingkup KKP.

Tabel 2. Unit Kerja KKP yang Mendapat Predikat WBK

NO	UNIT KERJA	TAHUN PREDIKAT WBK
1	Balai Karantina Ikan Kelas II Semarang	2014 *)
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi	2014 *)
3	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat	2015 *)
4	Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan	2016 *)
5	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	2017
6	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	2017
7	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
8	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Sumatera Utara	2017
9	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak, Kalimantan Barat	2017
10	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	2017
11	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Jawa Tengah	2017
12	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Jawa Tengah	2017
13	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	2017
14	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol	2017
15	Direktorat Logistik	2017
16	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	2018
17	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, Ambon	2018
18	Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Manado	2018
19	Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	2018
20	Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	2018
21	Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung	2018
22	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
23	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	2019
24	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	2019
25	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong	2019
26	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi	2019
27	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat	2019
28	Pangkalan Pengawasan SDKP (PPSDKP) Benoa	2019
29	Pangkalan Pengawasan SDKP (PPSDKP) Jakarta	2019
30	Balai Riset Observasi Laut (BROL) Perancak	2019

NO	UNIT KERJA	TAHUN PREDIKAT WBK
31	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam	2019
32	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	2019
33	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBPPHP) Jakarta	2019
34	Balai KIPM Surabaya II	2019
35	Balai KIPM Denpasar	2019

Keterangan :

*) Pemberian Predikat oleh KemenPAN dan RB pada 2014-2016, selanjutnya sejak 2017 dan 2018 dilakukan pemberian predikat oleh MKP. Pada 2019 merupakan gabungan penilaian internal dan eksternal

Tabel 3. Target dan Capaian (Kumulatif) Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019)*	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif)	4	3	6	4	7	15	12	22	37	35

Keterangan : T = Target; R = Realisasi

*) Target hasil direvisi sejalan dengan revisi Renstra KKP dan Itjen KKP

g. IKU Level Kapabilitas Itjen (IACM)

Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui metode *Internal Audit Capability Model* (IACM) merupakan gambaran kondisi tata kelola organisasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh APIP untuk mengembangkan pengawasan intern yang efektif dan profesional. Level ini diperoleh dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Upaya yang dilakukan Itjen KKP untuk mencapai Level Kapabilitas (IACM) antara lain Penyempurnaan Program Kerja Pengawasan, Evaluasi Kendali Mutu, Telaah Sejawat intern, dan Pelatihan Aplikasi Sistem Manajemen Audit, serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Itjen KKP.

Tabel 4. Capaian Level Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019)*	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Level Kapabilitas Itjen KKP	Level 3	Level 3 (>3 C)	Level 3	Level 3 (3 C)	Level 3	Level 3 (1 C)	Level 3	Level 3 (TC)	Level 3	Level 3 (TC)

Keterangan :

- C = terdapat catatan pada hasil di beberapa elemen penilaian
- TC = Tanpa Catatan atau Murni

Capaian IKU ini pada selama 5 tahun terakhir (2015-2019) secara umum cukup baik yaitu selalu mendapat level 3 (*integrated*) yang berarti bahwa Itjen KKP dianggap telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Walaupun pada awalnya sejak 2015 s.d. 2017 masih terdapat beberapa catatan atas capaian Level 3, namun sejak 2018 telah memenuhi level 3 secara penuh, bahkan pada tahun 2019 mendapat status penilaian lebih baik yaitu level 3 bergerak menuju level 4 (*Managed*). Unsur yang perlu dipenuhi kedepannya yaitu Itjen KKP belum memiliki unit pengawasan diluar Itjen KKP yang mengawasi pelaksanaan kegiatan Itjen KKP, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan dalam rangka memperkuat independensi.

Data BPKP sampai dengan tahun 2018, terdapat 40 dari 85 APIP atau 47,05% pada Kementerian/Lembaga Pusat yang telah mendapatkan level 3, termasuk didalamnya Itjen KKP, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Level Kapabilitas APIP di Indonesia berdasarkan Metode IACM s.d. Tahun 2018

No	Kedeputian Pembina	Jumlah APIP Mitra	Jumlah APIP K/L Kapasitas Level 3		APIP K/ L dengan Kapasitas Level 3
			2017	2018	
1	PEREKONOMIAN	27	8	15	<p><u>Level 3:</u> 1) Kem. Keuangan, 2) Bappenas, 3) Kem. Kelautan dan Perikanan, 4) Kem. Pertanian, 5) Kem. ESDM, 6) Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p><u>Level 3 Dengan Catatan (DC):</u> 7) LKPP, 8) Kem. Perdagangan, 9) BMKG, 10) Kem. Perindustrian, 11) Kem. Perhubungan, 12) Kem. Pariwisata, 13) BNP2TKI, 14) BPS, 15) Kem. Ketenagakerjaan</p>
2	POLHUKAM	54	11	23	<p><u>Level 3:</u> 1) BPKP; 2) KPK; 3) BPK; 4) BPPT; 5) Kemenkes; 6) BNN; 7) MK; 8) BATAN; 9) BPOM.</p> <p><u>Level 3 DC:</u> 10) Kemenkominfo; 11) LAN; 12) Kemenkumham; 13) Kemendikbud; 14) KemenPAN-RB; 15) Bapeten; 16) Kemenhan; 17) Kemenag; 18) Kemenlu; 19) Kemensetneg; 20) POLRI; 21) MA; 22) LAPAN; 23) Badan Informasi Geospasial.</p>
3	PKD	1	-	-	-
4	AN	3	1	2	<p><u>Level 3:</u> 1) LP-RRRI</p> <p><u>Level 3 DC:</u> 2) Kemen. BUMN</p>
Jumlah		85	20	40	

Sumber : Laporan Kinerja BPKP 2018

h. IKU Maturitas Implementasi SPI KKP

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP.

Hasil penilaian IKU ini dilakukan oleh tim dari BPKP terhadap implementasi SPI di lingkungan KKP secara berkala yaitu tiap tahun. Capaian level Maturitas SPI KKP sejak tahun 2016 telah mencapai level 3 (terdefinisi). Setiap tahun nilai dari level 3 Maturitas SPI KKP mengalami kenaikan sebagaimana tabel dibawah ini. Pencapaian level 3 (terdefinisi) atas tingkat implementasi SPI di lingkungan KKP dapat berarti bahwa KKP telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang telah terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Hal ini menggambarkan bahwa KKP selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada atas penilaian pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa KKP telah cukup baik mengimplementasikan SPI,

namun demikian masih terdapat catatan terkait evaluasi atas pengendalian intern masih lemah dalam hal dokumentasinya. Data BPKP terkait perkembangan penilaian maturitas SPIP Per Desember 2018 menunjuk, terdapat 50 dari 84 K/L (termasuk KKP), 23 dari 34 Pemerintah Daerah Provinsi, dan 229 dari 508 Kab/Kota yang telah mencapai level 3.

Tabel 6. Hasil Pencapaian Nilai Evaluasi Level Maturitas SPIP KKP

No	Unsur SPIP	Maks Nilai	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Capaian	(%)	Capaian	(%)	Capaian	(%)	Capaian	(%)
1	Lingkungan Pengendalian	1,50	0,900	60,00	0,900	60,00	1,089	72,60	1,087	72,47
2	Penilaian Risiko	1,00	0,600	60,00	0,600	60,00	0,800	80,00	0,800	80,00
3	Kegiatan Pengendalian	1,25	0,682	54,57	0,705	56,36	0,748	59,84	0,795	63,60
4	Informasi dan Komunikasi	0,50	0,250	50,00	0,300	60,00	0,300	60,00	0,300	60,00
5	Pemantauan	0,75	0,500	80,00	0,600	80,00	0,525	70,00	0,525	70,00
	Jumlah	5,00	3,032	60,64	3,105	62,09	3,462	69,24	3,507	70,14
	Level Maturitas		3		3		3		3	

Sumber : Data olahan dari Laporan BPKP 2016-2019

2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pembangunan KP Tahun 2015-2019

Dalam mencapai target kinerja pengawasan tahun 2015-2019, Itjen KKP telah melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan prioritas yang merupakan upaya dan implementasi dari langkah operasional kebijakan pengawasan tahun 2015-2019. Beberapa kegiatan pengawasan tersebut yaitu:

- a. Pengawasan akuntabilitas program pembangunan kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif, efisien dan ekonomis, serta akuntabel. Kegiatan dilaksanakan pada 9 (sembilan) unit kerja eselon I beserta Satker dan UPT. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa reviu perencanaan dan penganggaran, audit kinerja, evaluasi kegiatan dan anggaran, evaluasi PNPB,

pengawasan kegiatan manajerial, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

- b. Pengawasan kegiatan prioritas KKP, yang dilaksanakan dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan prioritas KKP agar memenuhi beberapa kriteria kesesuaian, yaitu kesesuaian sasaran, kebutuhan, sarana dan prasarana, spesifikasi, dan pelaporan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai implementasi peran Itjen KKP dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan dilaksanakan pada 8 (delapan) unit kerja eselon I yang mempunyai kegiatan prioritas KKP. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa evaluasi dan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP. Pada akhir periode pembangunan kelautan dan perikanan jangka menengah 2015-2019 yaitu pada bulan September 2019, Itjen KKP telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2015-2019 sebagai bentuk evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas KKP, sekaligus menjadi sumber data dan informasi pimpinan KKP dalam pengambilan kebijakan untuk periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.
- c. Pengawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), yang dilaksanakan dalam rangka mengawal pelaksanaan pembangunan SKPT mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan atas pembangunan SKPT. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suatu pembangunan SKPT yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) pembangunan SKPT, yaitu SKPT Sabang, Sebatik, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Moa, Biak, Mimika, Saumlaki, Natuna, Merauke, dan Morotai. Pada akhir periode pembangunan kelautan dan perikanan jangka menengah 2015-2019 yaitu pada bulan Oktober 2019, Itjen KKP telah

melaksanakan evaluasi atas pembangunan SKPT tahun 2015-2019.

- d. *Probity Audit* atas kegiatan yang berisiko tinggi/strategis, yang dilaksanakan dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan yang berisiko tinggi dan/atau strategis. Pada tiap awal tahun anggaran, Itjen KKP menyusun profil risiko kegiatan lingkup KKP dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Kegiatan yang berisiko tinggi dan mempunyai nilai strategis dilaksanakan pengawasan dalam bentuk Probity Audit. Pelaksanaan kegiatan Probity Audit dimulai pada awal tahun 2018.
- e. Pengawasan Implementasi Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan dalam rangka mengawal penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP. Kegiatan dilaksanakan pada 9 (sembilan) unit kerja eselon I. Pengawasan terhadap implementasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan merupakan bentuk komitmen Itjen KKP dalam mewujudkan program Reformasi Birokrasi Nasional.
- f. Pengawasan atas Laporan Keuangan KKP, yang dilaksanakan dalam rangka mengawal peningkatan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan KKP. Pengawasan terhadap LK KKP dilaksanakan dengan beberapa sasaran, yaitu pengelolaan BMN/Aset KKP dan barang persediaan, tindak lanjut revaluasi BMN KKP, pencatatan dan penyusunan LK KKP, serta pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Kegiatan dilaksanakan pada seluruh Satker KKP. Pengawasan atas LK KKP dilaksanakan dalam bentuk reviu LK KKP, pendampingan penyusunan LK KKP, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, reviu atas revaluasi BMN KKP, evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan, dan evaluasi tata kelola BMN KKP, serta reviu pengendalian intern pelaporan keuangan.
- g. Audit dengan tujuan tertentu (ATT), yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan dengan tujuan khusus diluar pengawasan

keuangan dan pengawasan kinerja. Beberapa substansi yang menjadi tujuan pelaksanaan ATT yaitu bidang kepegawaian, pengaduan masyarakat/*whistle blowing system*, pengadaan barang dan jasa, indikasi tindak kecurangan, indikasi tindak pidana korupsi, maupun substansi atas perintah Menteri.

- h. Pembangunan zona integritas di lingkungan KKP, yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan suatu wilayah yang bebas dari korupsi. Pelaksanaan pembangunan zona integritas dilaksanakan baik di Satker Pusat maupun Satker Daerah. Pada kurun waktu tahun 2015-2019, telah dilakukan pembangunan zona integritas di lingkungan KKP dan tercapai sebanyak 35 unit kerja yang terdiri dari Satker Pusat maupun Kantor Daerah (UPT) yang berpredikat menuju WBK.

Atas beberapa pelaksanaan kegiatan pengawasan prioritas di lingkungan KKP pada periode tahun 2015-2019, berikut rincian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan:

Tabel 7. Realisasi Kegiatan Pengawasan Prioritas Tahun 2015 - 2019

No.	Kegiatan Prioritas	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengawasan akuntabilitas KKP (eselon I)	9	9	9	9	9
2.	Pengawasan Kegiatan Prioritas KKP (eselon I)	8	8	8	8	8
3.	Pengawasan SKPT (eselon I)	4	4	4	4	4
4.	Probit Audit (kegiatan)	-	-	-	35	16
5.	Pengawasan Implementasi Reformasi Birokrasi KKP (eselon I)	9	9	9	9	9
6.	Pengawasan Laporan Keuangan KKP (eselon I)	9	9	9	9	9
7.	Audit dengan Tujuan Tertentu (kegiatan)	6	21	34	23	17
8.	Pembangunan Zona Integritas KKP (unit kerja)	3	4	15	22	35

B. Potensi dan Permasalahan

Sebagai unsur pengawasan dalam suatu organisasi KKP, Itjen KKP harus dapat melihat beberapa potensi dan permasalahan yang ada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi Itjen KKP. Hal tersebut diperlukan untuk menyusun visi dan misi serta langkah

operasional pengawasan dalam mengawal pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Dalam mengidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang ada, dilakukan melalui analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats* (SWOT). SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya digunakan untuk merancang strategi dan langkah operasional yang merupakan program kerja pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan terhadap pelaksanaan pengawasan internal dapat dijabarkan melalui faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Potensi dan permasalahan pada faktor internal dapat dijabarkan dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu kekuatan (*Strengths*) yang merupakan potensi, dan kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan permasalahan internal organisasi. Beberapa identifikasi atas potensi dan permasalahan tersebut yaitu:

1) Kekuatan (*Strengths*)

Faktor internal yang berupa kekuatan organisasi Itjen KKP, yaitu:

- a) Komitmen dalam membangun zona integritas.
- b) Kapabilitas APIP terus meningkat.
- c) Standar audit dan kode etik SDM Pengawasan yang terimplementasi.
- d) Keberadaan Internal *audit charter*.
- e) Kewenangan Itjen yang semakin luas berdasarkan legal formal yang ada.
- f) Kemudahan akses data dan informasi.

2) Kelemahan (*Weaknesses*)

Faktor internal yang berupa kelemahan organisasi Itjen KKP, yaitu:

- a) Kecakapan/kemampuan SDM Pengawasan yang belum merata (standar kompetensi SDM pengawasan belum memadai).
- b) Belum optimalnya pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan.
- d) Kurangnya law enforcement.

b. Faktor Eksternal

Potensi dan permasalahan pada faktor eksternal dapat dijabarkan dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu peluang (*Opportunities*) yang merupakan potensi, dan ancaman (*Threats*) yang merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh negatif pada organisasi. Beberapa indentifikasi atas potensi dan permasalahan tersebut yaitu:

1) Peluang (*Opportunities*)

Faktor eksternal yang berupa peluang bagi organisasi Itjen KKP, yaitu:

- a) Respon positif *stakeholder* atas aktivitas Itjen.
- b) Iklim keterbukaan.
- c) Kerjasama dengan pihak eksternal yang memberikan mutual benefit.

2) Ancaman (*Threats*)

Faktor eksternal yang berupa ancaman organisasi Itjen KKP, yaitu:

- a) Suap dan gratifikasi dari *stakeholder* Itjen.
- b) Rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan oleh *stakeholder* Itjen.

2. Analisis Potensi dan Permasalahan

Atas hasil indentifikasi potensi dan permasalahan yang ada, hal tersebut digunakan untuk dianalisis yang selanjutnya digunakan untuk menentukan strategi dan langkah operasional pengawasan pada tahun 2020-2024. Hasil analisis terhadap potensi dan

permasalahan yang telah diidentifikasi, dijabarkan dalam bentuk strategi sebagai berikut:

a. Strategi *Strengths-Opportunities* (SO)

Strategi SO merupakan strategi dengan menciptakan strategi *offensive* yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi tersebut yaitu:

- 1) Pengawasan secara optimal untuk memanfaatkan respon positif stakeholder Itjen
- 2) Kebijakan strategis dari Itjen dengan dukungan dari para pimpinan unit kerja sebagai stakeholders.
- 3) Pengembangan sistem teknologi pengawasan berbasis data dan informasi untuk memanfaatkan iklim keterbukaan dan respon positif stakeholder Itjen.
- 4) Mengoptimalkan sinergi pengawasan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pengawasan yang lebih baik.

b. Strategi *Strengths-Threats* (ST)

Strategi ST merupakan strategi dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Adapun strategi tersebut yaitu:

- 1) Pembangunan budaya integritas pada seluruh unit kerja di lingkup KKP untuk mengatasi adanya suap dan gratifikasi
- 2) Optimalisasi pemanfaatan kewenangan pengawasan dan teknologi informasi untuk mendorong efektivitas pengawasan dan proses tindak lanjut hasil pengawasan pada stakeholder Itjen

c. Strategi *Weaknesses-Opportunities* (WO)

Strategi WO merupakan strategi dengan menciptakan strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi tersebut yaitu:

- 1) Peningkatan kompetensi SDM Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan

- 2) Peningkatan teknik komunikasi SDM Pengawasan untuk memanfaatkan iklim keterbukaan dan respon positif stakeholder
- 3) Optimasi pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memanfaatkan respon positif stakeholder
- 4) Optimasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memanfaatkan respon positif stakeholder dalam hal pengawasan internal
- 5) Penegakkan *reward and punishment* untuk meningkatkan kepedulian SDM Pengawasan terhadap pengawasan stakeholder

d. Strategi *Weaknesses-Threats* (WT)

Strategi WT merupakan strategi dengan menciptakan strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Adapun strategi tersebut yaitu:

- 1) Peningkatan kecakapan SDM Pengawasan dalam berintegritas untuk menghindari adanya suap dan gratifikasi dari stakeholder
- 2) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM Pengawasan dalam bidang teknologi informasi untuk optimalisasi pengawasan beserta tindak lanjut rekomendasinya
- 3) Penegakkan *reward and punishment* untuk meningkatkan kepedulian SDM Pengawasan dalam menangkal gratifikasi, suap, dan hal sejenis lainnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Didasarkan pada visi KKP tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan visi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini dapat diartikan bahwa KKP mendukung penuh Visi Presiden khususnya dalam hal pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dukungan KKP dalam bentuk visi tersebut juga menjadi acuan bagi Itjen KKP dalam menentukan arah pengawasan internal selama kurun 5 (lima) tahun pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Sebagai unsur pengawas intern di lingkungan KKP, visi Itjen KKP juga disusun untuk mendukung Visi Presiden secara umum dan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Oleh karena itu dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**.

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dan *clean government*.

B. Misi

Dari 4 (empat) misi Presiden yang dijalankan oleh KKP yaitu misi ke-1 “peningkatan kualitas manusia Indonesia”; misi ke-2 “struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”; misi ke-4 “mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”; dan misi ke-8

“pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, Itjen KKP melaksanakan 1 (satu) misi terkait dengan misi ke-8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Mengacu pada tugas, fungsi dan peran Itjen KKP serta misi Presiden ke-8 yang dijalankan oleh KKP, terdapat 3 (tiga) misi Itjen KKP tahun 2020-2024, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP;
2. Mendorong pengendalian intern yang efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP; dan
3. Mendorong terwujudnya sumber daya aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.

C. Tujuan

Dalam menjabarkan visi dan misi Itjen KKP tahun 2020-2024, maka tujuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

1. Terwujudnya kinerja KKP yang efektif dan efisien;
2. Terciptanya suatu sistem dan tata kelola KKP yang baik; dan
3. Terwujudnya budaya integritas di lingkungan KKP.

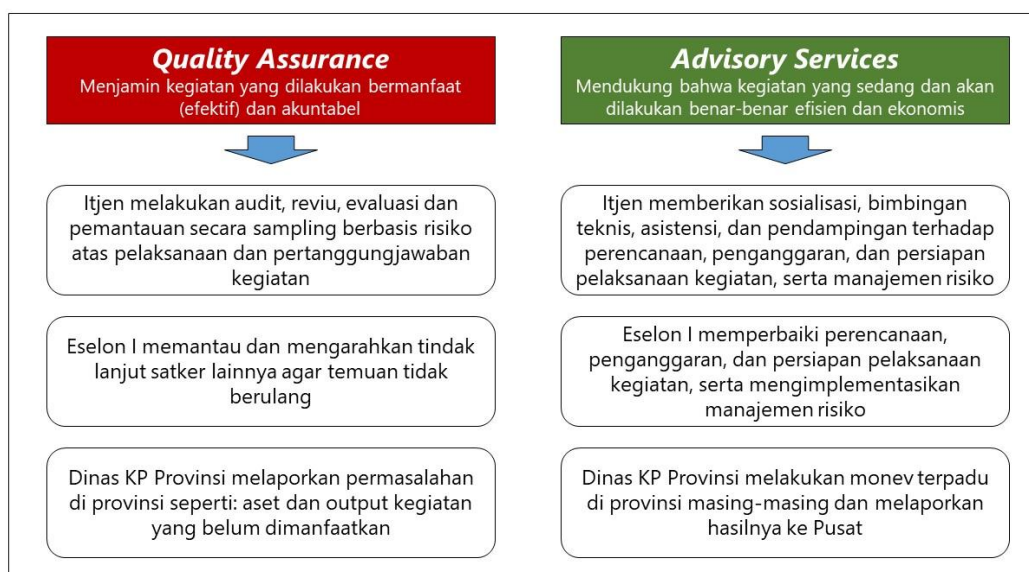
Penjabaran lebih lanjut terhadap tujuan tersebut atas pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan KKP sebagai berikut:

Tabel 8. Uraian Tujuan dan Indikatornya

No.	Tujuan	Uraian	Indikator Tujuan
1.	Terwujudnya kinerja KKP yang efektif dan efisien	Itjen KKP memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP	Itjen KKP mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (<i>value for money audit</i>)
2.	Terciptanya suatu sistem dan tata kelola KKP yang baik	Itjen KKP memberikan peringatan dini dan mendorong peningkatan efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP	- Itjen KKP mampu mendeteksi terjadinya indikasi korupsi dan kolusi - Itjen KKP memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern
		Itjen KKP memberikan upaya dalam bentuk pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP	Itjen KKP mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

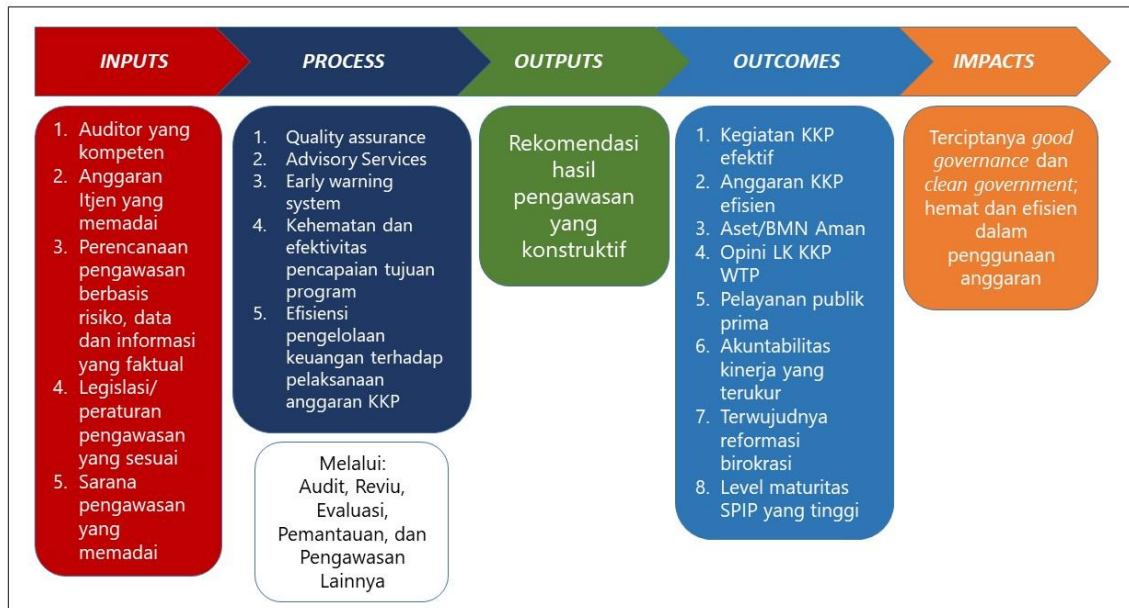
No.	Tujuan	Uraian	Indikator Tujuan
3.	Terwujudnya budaya integritas di lingkungan KKP	Itjen KKP memberikan pendampingan dan asistensi serta pemantauan terhadap implementasi pembangunan zona integritas di lingkungan KKP	Itjen KKP mampu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur KKP yang berintegritas

Penjabaran terhadap tujuan Itjen KKP tersebut juga dapat memberikan gambaran terhadap adanya peran dan layanan Itjen KKP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi lain di lingkup KKP.



Gambar 4. Quality Assurance dan Advisory Services

Selanjutnya apabila dijabarkan ke dalam kerangka logis (*logic model*), penjabaran dari tujuan dan peran serta layanan Itjen KKP disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Kerangka logis Itjen KKP

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan suatu ukuran pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran strategis Inspektorat Jenderal merupakan sasaran strategis yang diturunkan dari sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun sasaran strategis Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP; dan
2. Pengawasan Intern KKP yang Handal.

Untuk dapat mencapai suatu tujuan melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi ukuran dan target capaian. Adapun indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP

Sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP dan Inspektorat Jenderal” dicapai dengan indikator kinerja:

- a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP, pada tiap tahun kurang dari sama dengan 1%;

- b. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal, dari level 3 pada tahun 2020 menjadi level 4 pada tahun 2024;
- c. Tingkat Maturitas SPIP KKP, pada level 3 untuk tiap tahun;
- d. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK, dari 42 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 70 pada tahun 2024;
- e. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP, dari nilai 30 pada tahun 2020 menjadi nilai 34 pada tahun 2024;
- f. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP, dari nilai A (81) pada tahun 2020 menjadi nilai A (85) pada tahun 2024;
- g. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP, dari indeks 72 pada tahun 2020 menjadi indeks 76 pada tahun 2024;
- h. Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen KKP, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024;
- i. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 88% pada tahun 2024;
- j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP, dari nilai 88 pada tahun 2020 menjadi nilai 90 pada tahun 2024; dan
- k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP, dari nilai 85 pada tahun 2020 menjadi nilai 89 pada tahun 2024.

2. Pengawasan Intern KKP yang Handal

Sasaran strategis “Pengawasan Intern KKP yang Handal” dicapai dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- b. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- c. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;

- d. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP, dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- e. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP, sebanyak 18 rekomendasi pada tiap tahun;
- f. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP, dari 85% pada tahun 2020 menjadi 89% pada tahun 2024;
- g. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP, dari 85% pada tahun 2020 menjadi 89% pada tahun 2024; dan;
- h. Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP, dari indeks 4 pada tahun 2020 menjadi indeks 4,20 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional

Arah kebijakan umum pengawasan nasional tahun 2020-2024 tercantum pada beberapa misi Presiden RI tahun 2020-2024 dalam mencapai visi Presiden RI tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Adapun beberapa misi Presiden RI dalam substansi kebijakan umum pengawasan nasional yaitu termaktub pada misi ke-6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dan misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”.

Penjabaran atas kebijakaan umum pengawasan nasional terhadap misi Presiden RI dimaksud sebagai berikut:

- a. Misi ke-6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”

Uraian misi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Presiden RI sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan penataan regulasi
- 2) Melanjutkan reformasi birokrasi dan proses penegakan hukum
- 3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 4) Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- 5) Mengembangkan budaya sadar hukum

Terhadap misi dan kegiatan prioritas Presiden RI, kebijakan umum pengawasan nasional dapat diterjemahkan melalui pengawalan pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan implementasi atas kegiatan prioritas ke-3 “Pencegahan dan pemberantasan korupsi” dan kegiatan prioritas ke-5 “Mengembangkan budaya sadar hukum”.

b. Misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”

Uraian misi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Presiden RI sebagai berikut:

- 1) Aktualisasi demokrasi Pancasila.
- 2) Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang profesional.
- 3) Reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi.
- 4) Reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien.
- 5) Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 6) Reformasi pelayanan public.

Terhadap misi dan kegiatan prioritas Presiden RI, kebijakan umum pengawasan nasional dapat diterjemahkan melalui pengawalan pada organisasi KKP atas implementasi kegiatan prioritas ke-2 “Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang profesional”, kegiatan prioritas ke-3 “Reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi”, dan kegiatan prioritas ke-6 “Reformasi pelayanan publik”.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

KKP sebagai organisasi yang membantu Presiden RI pada bidang kelautan dan perikanan, menetapkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2020-2024 sebagai visi dan misi KKP tahun 2020-2024. Implementasi atas visi dan misi tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat dan memberi manfaat serta menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Sebagai unsur pengawasan pada organisasi KKP, Itjen KKP turut serta dalam mengimplementasikan visi dan misi KKP tahun 2020-2024 sebagai wujud gotong royong dalam mengawal pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang

berorientasi pada hasil, melalui implementasi atas beberapa kegiatan prioritas Presiden RI tahun 2020-2024.

B. Kebijakan Pengawasan

Itjen KKP sebagai bagian integral dari KKP yang berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan yang ditetapkan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pengawasan yang profesional melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selain itu, arah kebijakan pengawasan juga mengacu pada rencana pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pengawasan diarahkan untuk:

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok pengawasan intern di lingkungan KKP tahun 2020-2024 diarahkan untuk dapat mengawal kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, menjaga reputasi KKP, dan mengawal personil KKP agar terhindar dari kasus hukum. Adapun 10 (sepuluh) kebijakan pokok pengawasan intern di lingkungan KKP, yaitu:

- a. Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Mendorong implementasi *Three Lines of Defense* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Mengawal percepatan pembangunan budaya integritas dan penerapan program anti korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- e. Mengawal implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Memastikan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Mengawal implementasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Mengawal efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Mengawal percepatan reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- j. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Kebijakan Pengarusutamaan

Sesuai dengan rencana pembangunan kelautan dan perikanan jangka menengah tahun 2020-2024, terdapat beberapa kebijakan pengarusutamaan sebagaimana terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang diadopsi pada pelaksanaan pengawasan internal, yaitu pengarusutamaan gender, tata kelola, dan transformasi digital pada Itjen KKP.

C. Strategi Pengawasan

Seiring dengan meningkatnya peran penting pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pembangunan nasional, peran pengawasan terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan juga semakin besar. Kebijakan pengawasan yang ditetapkan, merupakan arah dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan KKP yang perlu diimplemantasikan melalui strategi pengawasan berupa langkah-langkah operasional pengawasan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pokok

Beberapa langkah operasional dalam mengimplementasikan 10 (sepuluh) kebijakan pokok pengawasan internal di lingkungan KKP tahun 2020-2024, yaitu:

a. Pengawasan akuntabilitas pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi pada hasil

Langkah operasional pengawasan akuntabilitas pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi pada hasil dilaksanakan melalui: (a) pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan; (b) pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN; (c) Pengawasan pengelolaan PNBPN; (d) Pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP; (e) Penanganan pengaduan masyarakat/*whistle blowing system*; (f) Pengawasan implementasi pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan; dan (g) Pengawasan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

b. Pengendalian sistem dan tata kelola program pembangunan kelautan dan perikanan

Langkah operasional pengendalian sistem dan tata kelola program pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui: (a) Pengawasan kinerja manajerial KKP; (b) Peningkatan kualitas laporan keuangan KKP; dan (c) Pengawasan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan.

c. Pengawasan terhadap implementasi Reformasi Birokrasi KKP

Langkah operasional pengawasan terhadap implementasi Reformasi Birokrasi KKP dilaksanakan melalui: (a) Evaluasi atas Implementasi RB; (b) Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP; (c) Evaluasi Pelayanan Publik; dan (d) Evaluasi Benturan Kepentingan.

d. Pembangunan budaya integritas di lingkungan KKP

Langkah operasional pembangunan budaya integritas di lingkungan KKP dilaksanakan melalui: (a) Pembangunan zona integritas; (b) Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG); dan (c) Pengawasan terhadap pelaporan harta kekayaan aparatur KKP.

e. Sinergi pengawasan

Langkah operasional sinergi pengawasan dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran Itjen KKP dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi serta peran pengawasan internal, melalui sinergi pengawasan dengan pihak eksternal seperti BPK RI, BPKP RI, KPK, Kementerian PAN dan RB, Itjen Kementerian Dalam Negeri, dan APIP Daerah.

f. Optimasi sumber daya pengawasan

Langkah operasional optimasi sumber daya pengawasan dilaksanakan melalui: (a) Peningkatan SDM pengawasan yang profesional dan berintegritas; (b) Peningkatan efektivitas anggaran pengawasan; (c) Pengawasan berbasis risiko, data dan informasi yang faktual; (d) Optimasi teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pendukungnya; dan (e) Peningkatan sarana pengawasan.

2. Kebijakan Pengarusutamaan

Beberapa langkah operasional pada kebijakan pengarusutamaan pada unit kerja Itjen KKP tahun 2020-2024, yaitu:

a. Gender

Langkah operasional dalam pengarusutamaan gender pada Itjen KKP dilaksanakan melalui: (a) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan (b) Peningkatan peran dan manfaat gender dalam pelaksanaan pengawasan internal.

b. Tata kelola

Langkah operasional tata kelola dilaksanakan melalui implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Itjen KKP. Dengan terciptanya tata kelola yang baik diharapkan dapat

mewujudkan suatu tata kelola yang akuntabel, efektif, efisien. Adapun langkah operasional tersebut dilaksanakan melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen ASN, melalui: (a) Peningkatan kualitas, profesionalitas dan integritas ASN; (b) *Talent Management* untuk pengembangan pola rekrutmen dan suksesi pimpinan; (c) *Assessment* pegawai untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai secara rutin; (d) *Career Planning* sesuai kompetensi dan bakat; dan (e) Implementasi *Reward and Punishment*.
 - 2) Meningkatkan sistem data dan informasi pengawasan, melalui: (a) Sistem data dan informasi pengawasan satu pintu; dan (b) Peningkatan akses data hasil pengawasan auditan.
 - 3) Meningkatkan akutabilitas kinerja, melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Organisasi Itjen KKP dengan tingkat maturitas SPIP level IV; (c) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran; (d) Peningkatan kualitas pelaporan keuangan; (e) Penguatan SAKIP; dan (f) Penerapan zona integritas menuju birokrasi yang akuntabel, bersih, dan melayani.
- c. Transformasi Digital

Langkah operasional transformasi digital dilaksanakan melalui optimasi penerapan pengawasan berbasis elektronik dan optimalisasi teknologi informasi.

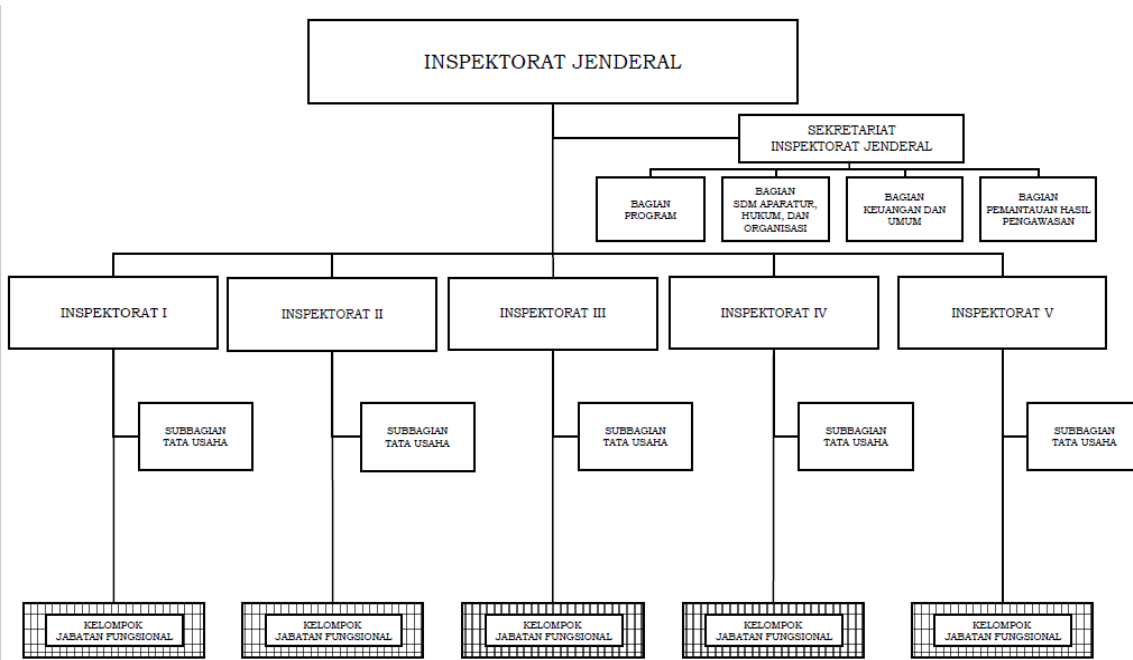
D. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur proses pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP dalam rangka mencapai tujuan pengawasan intern.

1. Regulasi perencanaan pengawasan, antara lain:
 - a. SOP Perencanaan Pengawasan
 - b. *Audit internal Charter*

- c. Kebijakan Pengawasan
 - d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Regulasi pelaksanaan pengawasan
- a. Peraturan/pedoman pelaksanaan atau pedoman teknis terkait pelaksanaan pengawasan (Peraturan Pemerintah, Perpres, PerMenkeu, PerMenKP dan pedoman lainnya)
 - b. SOP dan/atau program kerja pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya)
 - c. Peraturan terkait pelaksanaan pengawasan sesuai kode Etik
 - d. SOP/pedoman implementasi Audit Management System (AMS)
 - e. SOP/pedoman penggunaan SIDAK
 - f. SOP/pedoman e-WBK, dan pedoman lain yang relevan
3. Regulasi pelaporan pengawasan
- a. SOP Pelaporan
 - b. Peraturan terkait standar pelaporan hasil pengawasan
4. Regulasi pengendalian pengawasan intern
- a. Manajemen risiko
 - b. Pedoman pengukuran/penilaian kinerja pengawasan melalui evaluasi
 - c. Pedoman kendali mutu pengawasan.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Itjen.



Gambar 6. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja Program

Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki suatu unit kerja dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP. Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan baik kegiatan pengawasan internal maupun dukungan manajemen dan teknis Inspektorat Jenderal.

Sebagai salah satu wujud efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan telah menyusun restrukturisasi program dan penganggaran melalui proses Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit kerja eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi K/L. Program dapat bersifat lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L. Perumusan program baik yang bersifat lintas unit kerja eselon I atau lintas K/L dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait. Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2020. Hal tersebut dikarenakan bahwa jenis program pada seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal secara nasional sudah ditetapkan pada Program Generik yaitu program Dukungan Manajemen.

Implementasi program Dukungan Manajemen mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dengan beberapa indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (**outcome**) suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*) sehingga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Tabel 9. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP						
1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
2.	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (level)	3	3	3	3	4
3.	Tingkat Maturitas SPIP KKP (level)	3	3	3	3	3
4.	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi) (unit kerja)	42	49	56	63	70
5.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	30	31	32	33	34
6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)
7.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP	72	73	74	75	76
8.	Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen KKP (%)	82	84	86	88	90
9.	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	80	82	84	86	88
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (nilai)	88	89	89	90	90
11.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP (nilai)	85	86	87	88	89
Pengawasan Intern KKP yang Handal						
12.	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	70	72,5	75	77,5	80
13.	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	70	72,5	75	77,5	80
14.	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	70	72,5	75	77,5	80
15.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	60	65	70	75	80

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
16.	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18	18	18	18	18
17.	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	85	86	87	88	89
18.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	85	86	87	88	89
19.	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4	4,05	4,10	4,15	4,20

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Rincian Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana instansi/kementerian/lembaga dalam rangka mencapai sasaran strategis selama lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai bagian integral dari upaya pembangunan secara utuh.

Sebagai langkah untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan program pengawasan akan digunakan secara fokus dan tepat sasaran sesuai dengan arahan pimpinan untuk mengawal dan mengawasi pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan dukungan pendanaan

diharapkan seluruh program, kegiatan dan tujuan pengawasan dapat dicapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, prakiraan pendanaan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur TA 2020-2024 sebagaimana Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), sehingga sasaran utama yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, terutama dalam rangka mendukung pengawasan dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadi fokus utama dari Inspektorat Jenderal terutama dalam mengawal terlaksana dan tercapainya manfaat yang nyata bagi kemandirian serta kesejahteraan stakeholder kelautan dan perikanan.

Sangat disadari keberhasilan pelaksanaan program Inspektorat Jenderal KKP sangat erat kaitannya dengan dukungan seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dan mitra Eselon I KKP, tentunya kerja keras sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TARGET DAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2015 – 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja										
			2015		2016		2017		2018		2019		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP													
1.	Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan akuntabel	1.	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total anggaran KKP (%)	≤1	0,151	≤1	0,441	≤1	3,64	≤1	0,8	≤1	0,04
		2.	Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah (%) *	-	-	-	-	80	90,18	85	92,15	90	91,91
2.	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP (Nilai)	A	A (80.76)	A	A (84.59)	A	A (82.45)	A	A(81.64)	A (81)	A (81.64)
		4.	Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP (Nilai)	BB	BB (70.51)	BB	BB (78.74)	A	BB (78.95)	A	BB (78.6)	A	BB (78.60)
		5.	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP (Nilai)*	-	-	-	-	75	82,01	77	82,84	80	85,61
		6.	Jumlah Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) (kumulatif)	4	3	6	4	7	15	12	22	37	35
		7.	Level Kapabilitas Itjen KKP (IACM)	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
		8.	Level Maturitas Implementasi SPI KKP (Level) *	-	-	-	-	2	3	3	3	3	3

Catatan: *) Indikator kinerja terhitung mulai tahun 2017

LAMPIRAN 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2020-2024

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen							80.100.000	85.500.000	91.600.000	98.000.000	104.600.000	459.800.000
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP dan Inspektorat Jenderal											
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (level)</i>	3	3	3	3	4						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP KKP (level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi) (unit kerja)</i>	42	49	56	63	70						
	<i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP</i>	72	73	74	75	76						
	<i>Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen KKP (%)</i>	82	84	86	88	90						
	<i>Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)</i>	80	82	84	86	88						
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan Intern KKP yang Handal											
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)</i>	18	18	18	18	18						
	<i>Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)</i>	85	86	87	88	89						
	<i>Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)</i>	80	80	80	80	80						
	<i>Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)</i>	4	4,05	4,1	4,15	4,2						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						5.200.000	6.100.000	7.200.000	8.200.000	9.300.000	36.000.000
	<i>Nilai Evaluasi PMPRB Mitra Inspektorat I (Nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Evaluasi PM SAKIP Mitra Inspektorat I (Nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat I (Level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat I (satu tahun) (unit kerja)</i>	6	7	8	9	10						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)</i>	60	65	70	75	80						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)</i>	4	4	4	4	4						
	<i>Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)</i>	85	86	87	88	89						
	<i>Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat I (%)</i>	80	80	80	80	80						
	<i>Persentase Fungsi Administrasi dan Tata Usaha yang Terlaksana Secara Handal Lingkup Inspektorat I (%)</i>	100	100	100	100	100						
	<i>Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)</i>	100	100	100	100	100						
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						6.500.000	7.200.000	8.200.000	9.200.000	10.200.000	41.300.000
	<i>Nilai Evaluasi PMPRB Mitra Inspektorat II (Nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Evaluasi PM SAKIP Mitra Inspektorat II (Nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II (Level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat II (satu tahun) (unit)</i>	12	14	16	18	20						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>kerja)</i>											
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (rekomendasi)</i>	4	4	4	4	4						
	<i>Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II (%)</i>	85	86	87	88	89						
	<i>Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II (%)</i>	80	80	80	80	80						
	<i>Persentase Fungsi Administrasi dan Tata Usaha yang Terlaksana Secara Handal Lingkup Inspektorat II (%)</i>	100	100	100	100	100						
	<i>Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II (%)</i>	100	100	100	100	100						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						6.800.000	7.600.000	8.600.000	9.600.000	10.600.000	43.200.000
	<i>Nilai Evaluasi PMPRB Mitra Inspektorat III (Nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Evaluasi PM SAKIP Mitra Inspektorat III (Nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III (Level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat III (satu tahun) (unit kerja)</i>	15	17	19	21	23						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat III (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra</i>	4	4	4	4	4						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Inspektorat III (rekomendasi)</i>											
	<i>Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat III (%)</i>	85	86	87	88	89						
	<i>Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat III (%)</i>	80	80	80	80	80						
	<i>Persentase Fungsi Administrasi dan Tata Usaha yang Terlaksana Secara Handal Lingkup Inspektorat III (%)</i>	100	100	100	100	100						
	<i>Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III (%)</i>	100	100	100	100	100						
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						5.800.000	6.700.000	7.700.000	8.700.000	9.800.000	38.700.000
	<i>Nilai Evaluasi PMPRB Mitra Inspektorat IV (Nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Evaluasi PM SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat IV (satu tahun) (unit kerja)</i>	9	11	13	15	17						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (rekomendasi)</i>	4	4	4	4	4						
	<i>Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)</i>	85	86	87	88	89						
	<i>Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)</i>	80	80	80	80	80						
	<i>Persentase Fungsi Administrasi dan Tata Usaha yang Terlaksana Secara Handal Lingkup Inspektorat IV (%)</i>	100	100	100	100	100						
	<i>Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)</i>	100	100	100	100	100						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						5.800.000	6.700.000	7.700.000	8.700.000	9.700.000	38.600.000
	<i>Nilai Evaluasi PMPRB Mitra Inspektorat V (Nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Evaluasi PM SAKIP Mitra Inspektorat V (Nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat V (Level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat V (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat V (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Mitra Inspektorat V (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat V (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP</i>	100	100	100	100	100						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V (rekomendasi)</i>	2	2	2	2	2						
	<i>Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat V (%)</i>	85	86	87	88	89						
	<i>Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat V (%)</i>	80	80	80	80	80						
	<i>Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat V</i>	100	100	100	100	100						
	<i>Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V</i>	100	100	100	100	100						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan						55.200.000	57.300.000	59.400.000	61.800.000	64.300.000	298.000.000
	<i>Level Kapabilitas Itjen (IACM) (level)</i>	3	3	3	3	4						
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Itjen KKP (%)</i>	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP Itjen KKP (level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen (nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Itjen KKP (nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan</i>	4	4,05	4,1	4,15	4,2						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Itjen (indeks)</i>											
	<i>Indeks Profesionalitas ASN (indeks)</i>	72	73	74	75	76						
	<i>Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen KKP (%)</i>	82	84	86	88	90						
	<i>Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)</i>	80	82	84	86	88						
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Itjen KKP (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Itjen KKP (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Secara Tertib dan Handal (%)</i>	80	82	84	86	88						
	<i>Persentase Publikasi Informasi dan Kinerja Pengawasan Intern KKP Secara Aktual (%)</i>	80	82	84	86	88						
	<i>Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Itjen secara Tepat Waktu (%)</i>	100	100	100	100	100						